



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

(Studi Kasus Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)

Oleh:
Imam Luqmana

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Indonesia's handling of poverty already made efforts to complete this one with the program PNPM Mandiri is a program that provides assistance to communities in the form of physical or nonphysical development funding which is stimulant with community empowerment. The participation of the community in the village of Ketangirejo District of Grobogan Godong planning, program implementation PNPM Mandiri is still low. Low level of community participation in program PNPM Mandiri can be caused by several factors, including the socialization process of the Government's apparatus is not going well, the level of understanding and acceptance of the information society is still low.

Describing the results of research and used to approach descriptive quantitative. The method of collecting data is through interview and a questionnaire that is done with the election of respondents had to use the framework of the sample or of sampling the frame and pemilihan respondents conducted by the technique of adoption of a random sample simple

In General, this results in a low level of community participation to the PNPM Mandiri program is more affected by the lack of novasi of the officer executing PNPM Mandiri in carrying out socialization in society. From the process of socialization of society less participate because in the socialization of PNPM Mandiri just invited people only, so the effect on the low level of public knowledge of program proposals.

Hence, requires support and cooperation in a socialization of all the elements of the government (a public figure) and society together support the process of pnpm program in the village of ketangirejo. As a well, the condition of a social economy and education necessary to have a program of economic improvement from the government to improve the conditions.

Keywords: street vendors, Cooperation, Government and Private

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan dalam kehidupan suatu Negara adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan tolak ukur bagi sebuah Negara apakah pembangunan yang telah berlangsung dapat dinikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang hal-hal

yang bersifat atributif, dan pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai kurang menekankan aspek pemberdayaan, lebih bersifat *sinterklas* sehingga dampaknya justru membuat masyarakat menjadi manja, tidak mau kerja keras.

Perlu disadari bahwa masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan merupakan masalah yang kompleks, bersifat multidimensi sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya. Program pengentasan kemiskinan yang bersifat *sinterklas* seperti program bantuan langsung tunai (BLT) meskipun dilandasi dengan tujuan baik, namun kenyataannya tidak mampu mendorong warga miskin menjadi warga yang mandiri.

Program PNPM Mandiri juga di laksanakan Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan PNPM Mandiri dilaksanakan dari tahun 2009, alasan mendapatkan bantuan PNPM Mandiri tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Desa Ketangirejo masih dikategorikan masyarakat miskin. Yang di tandai masih adanya masyarakat Desa yang tidak mampu dalam memenuhi konsumsi dasar (masih mendapat bantuan raskin), ketiadaan akses terhadap transportasi yang memadai (masih banyak jalan yang rusak), ketiadaan jaminan masa depan karena penghasilan masyarakat yang minim (sehingga tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga) dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (untuk Desa Ketangirejo bahwa masyarakat yang tamat SD dengan jumlah 2.260).

Bantuan pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan yang di dalamnya masyarakat diberi peluang atau kesempatan untuk ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan karena ketersediaan biaya pembangunan sangat terbatas. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki akses untuk ikut terlibat, turut memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola hasil pembangunan sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan semata tetapi sudah menjadi subjek pembangunan. Seringnya terjadi kegagalan dalam menempatkan suatu proyek di wilayah perdesaan karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal sehingga masyarakat hanya sebagai penonton pelaksanaan program, sehingga

masyarakat tidak bertanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberadaan proyek tersebut.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terkesan lepas tangan terhadap proyek yang dilakukan oleh pemerintah walaupun mereka sendiri yang menikmati hasil pembangunan karena mereka beranggapan bahwa proyek tersebut merupakan milik pemerintah sehingga mereka tidak perlu melakukan pemeliharaan dan perawatan. Partisipasi masyarakat di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program PNPM Mandiri masih rendah, sementara masyarakat perdesaan pada umumnya mempunyai sifat gotong royong, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah proses sosialisasi dari aparat pemerintah tidak berjalan dengan baik, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi masih rendah. Sehingga, masyarakat timbul pendapat bahwa pelaksanaan ini tidak perlu di bantu karena merupakan proyek pemerintah.

Rumusan masalahnya adalah :

Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri dibidang fisik di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho D. (2003) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri.

Menurut A. Mazmanian dan Paula A. Sabatier (Wahab, 1997) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program, tapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono. AG, 2000) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, antara lain :

- a. Komunikasi, merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.
- b. Sumber-sumber daya (*resources*), dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan

pelayanan kepada publik.

- c. Sikap-sikap (*disposisi*), sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
- d. Struktur dan karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa ada tekanan dan jauh dari perintah. Ada bermacam-macam faktor yang mendorong kerelaan untuk mendorong keterlibatan ini, bisa karena kepentingan bisa karena solidaritas. Bisa memang karena mempunyai tujuan yang sama bisa juga karena ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda. Partisipasi pada dasarnya adalah kerelaan, tetapi bagaimana dapat menyalurkan kerelaan tersebut apabila salurannya sendiri tidak jelas. Betapapun besar niat seseorang untuk berpartisipasi, apabila tidak ada saluran dan wadahnya, niat itu akan terpendam dan atau tersalurkan pada sasaran yang tidak tepat. Oleh karena itulah dibutuhkan adanya penggerak dan kegiatan pembangkit partisipasi (Sumarto, H. 2009)

Partisipasi juga diartikan sebagai suatu sikap tanggap masyarakat lokal terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara baru pemakaian teknologi dan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi), modal, waktu, tenaga, dan uang untuk tercapainya tujuan pembangunan (Usman, 1998).

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Tjandraningsih (1996), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya masyarakat yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional (Suharto, 2005).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan atau sasaran, data, rencana, dan teknologi), aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), aspek keluaran atau output atau pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi (Adisasmita, 2006).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tentang rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program PNPM Mandiri dan faktor-faktor yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada program PNPM Mandiri di Desa Ketangirejo atau aspek apa saja yang dianggap sebagai pendukung dan pendorong pelaksanaan program program PNPM Mandiri di Desa Ketangirejo.

D. Hasil Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini hakikatnya hanya meliputi penentuan tujuan oleh masyarakat dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan potensi sumber-sumber yang ada dimasyarakat. Perencanaan merupakan tahap awal dalam suatu program, perencanaan partisipasi dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam program PNPM Mandiri, program yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun yang menjadi kendala dalam proses perencanaan banyak masyarakat yang tidak hadir dan tidak terlibat, padahal seharusnya seluruh masyarakat terlibat aktif dalam dalam perencanaan program, hal ini agar dalam menjalankan pembangunan tidak ada pembangunan yang sia-sia karena bentuknya pun untuk kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi juga dapat dilihat dari pelaksanaan, dimana program PNPM mandiri dijalankan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan hubungan antara pelaksanaan dan pelaksanaannya cukup erat, masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana, hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran rencana itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan program PNPM Mandiri itu yang dilaksanakan dan keaktifan masyarakat untuk ikut melaksanakan pekerjaan dengan memberikan kontribusi berupa uang, tenaga dan pikiran untuk menunjang setiap program tersebut. Namun pada kenyataannya pelaksanaan tidak sesuai yang diharapkan dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya

Tabel 3.14

Matriks faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri dibidang fisik

| o | Tahap an | Indikat or | Pres entase | |
|---|-----------------------------|---|-------------|--|
| | Sosialisasi dan Perencanaan | Tidak diundang dalam sosialisasi | 35% | |
| | | Tidak hadir dalam sosialisasi | 73,3 % | |
| | | Alasan tidak terlibat dalam sosialisasi | | |
| | | Tidak diundang | 35% | |
| | | Manaj emen waktu | 78,2 % | |
| | | Alasan pribadi | 8,3% | |
| | | Tidak terlibat dalam perencanaan | 73,3 % | |
| | | Alasan tidak terlibat dalam perencanaan | | |
| | | Tidak diundang | 48% | |
| | | Manaj emen waktu | 29,5 % | |
| | | Alasan pribadi | 23% | |
| | | Tingka t pengetahuan terhadap | 63,3 % | |

| | | usulan program | |
|-------------|---|----------------|--------|
| Pelaksanaan | Tidak terlibat dalam pelaksanaan | | 82% |
| | Alasan tidak terlibat dalam pelaksanaan | | |
| | Manaj emen waktu | | 59,1 % |
| | Inform asi | | 16,3 % |
| | Manaj emen pelaksanaan program | | 24,4 % |
| | Bentuk partisipasi | | |
| | Tenaga | | 18,3 % |

1. Sosialisasi dan Perencanaan

Penelitian yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri dibidang fisik secara global akan diuraikan berdasarkan beberapa tahapan. Pada tahapan pertama yaitu tahapan sosialisasi dan perencanaan yang akan diuraikan pada bab ini. Secara umum berdasarkan hasil penitian yang dilaksanakan bahwa dari awal program PNPM Mandiri dilaksanakan, masyarakat memiliki animo yang cukup rendah dalam berpartisipasi berkaitan dengan program PNPM Mandiri. Dari tahapan sosialisasi masyarakat banyak yang tidak hadir untuk mengikuti acara sosialisasi program PNPM Mandiri khususnya pada program fisik yang seharusnya membutuhkan keikutsertaan masyarakat yang cukup besar. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat dengan

masyarakat dan proses penyampaian informasi hanya dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung atau pribadi kepada setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mereka baik berupa masukan, usul, pendapat maupun gagasan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, diantaranya yaitu karena faktor pekerjaan dari masyarakat yang menurut mereka tidak bisa ditinggalkan, secara lugas masyarakat berfikir bahwa pekerjaan pribadi mereka lebih penting dari pada mengikuti program kegiatan program tersebut, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi adalah karena faktor kesehatan, ketidak tertarikAn terhadap program, dan bersamaan dengan kepentingan lain, namun ketiga faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi.

Dalam proses perencanaan pun masyarakat juga memiliki partisipasi yang rendah, karena apabila dilihat dari awal keikutsertaan masyarakat sudah tidak tertarik untuk berpartisipasi terhadap program tersebut, sehingga masyarakat tidak begitu mengetahui program-program apa saja yang direncanakan dalam program PNPM Mandiri. Itu disebabkan karena tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan usulan program rendah karena program tersebut tidak diinformasikan intensif terhadap masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan terhadap program saja, akan tetapi ketidak ikut sertaan masyarakat terhadap perencanaan program tersebut juga dikarenakan pengurus PNPM Mandiri tidak melibatkan seluruh masyarakat, hal ini dibuktikan dari responden yang menjadi sampel dalam penelitian banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak diundang sehingga hal ini memicu rendahnya animo masyarakat terhadap program PNPM Mandiri.

2. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan yang merupakan tahapan lanjutan dari sosialisasi dan perencanaan, menjelaskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan tergolong sangat rendah. Seperti hasil penelitian diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat adalah dikarenakan faktor pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Analisa akhir yang dapat disimpulkan bahwa dari kedua tahapan tersebut faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah faktor pekerjaan, sehingga dapat diartikan bahwa masyarakat sangat pragmatis terhadap kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan bekerja untuk kepentingan secara komunal. Namun ditengah rendahnya partisipasi masyarakat ada beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi walaupun secara kuantitatif jumlahnya tidak begitu besar. Mereka yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri rata-rata kebanyakan berpartisipasi dalam bentuk tenaga fisik, itupun dikarenakan mereka dalam pelaksanaan program tersebut berstatus sebagai tenaga borong, mengingat dalam pelaksanaan program tersebut manajemen PNPM Mandiri menggunakan tenaga borong atau tenaga bayaran untuk merealisasikan program fisik tersebut.

E. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka penelitian tentang analisis rendahnya partisipasi masyarakat pada program PNPM Mandiri Desa Ketangirejo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan wawancara dengan para informan terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada program PNPM desa Ketangirejo yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan. Faktor eksternal adalah manajemen program/sosialisasi program. Faktor peran pemerintah, pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan peran

fasilitator yang merupakan faktor eksternal mempengaruhi seluruh bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat kecuali pada partisipasi dalam pertemuan dan keaktifan berdiskusi dalam pertemuan. Sikap prakmatis masyarakat yang cenderung memilih untuk bekerja dan langsung mendapatkan uang dari pada mengikuti sosialisasi program PNPM Mandiri. Sikap masyarakat tersebut lebih dipengaruhi pada teknik sosialisasi dari pengurus PNPM Mandiri Desa Ketangirejo yang kurang menarik minat masyarakat serta mayoritas masyarakat Desa Ketangirejo yang kebanyakan berpenghasilan rendah, sehingga mereka terfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat Ketangirejo juga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat mengingat tingkat pendidikan sangat mempengaruhi terhadap kemajuan cara berfikir seseorang. Maka dari itu cara berfikir yang kurang maju karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut menimbulkan sifat apatis terhadap tindakan-tindakan dan pemikiran yang maju lewat program-program yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya adalah program PNPM Mandiri. Sejak dari awal, masyarakat memang kurang diikutsertakan dalam program PNPM Mandiri khususnya dalam bidang fisik. Hal ini terbukti karena memang banyak responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menerangkan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses sosialisasi tersebut. Faktor lain yaitu karena memang pengurus PNPM Mandiri hanya melibatkan masyarakat yang berketempatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut karena hal ini dinilai lebih efisien dan cepat dan tidak memerlukan keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar. Rendahnya pendapatan masyarakat juga menjadi pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program PNPM Mandiri. Korelasinya adalah bahwa sikap apatis masyarakat terhadap semua kegiatan PNPM Mandiri lebih disebabkan karena sikap pragmatis masyarakat yang cenderung melakukan aktifitas yang sekiranya menguntungkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan sikap

pragmatis lebih disebabkan karena factor pendapatan masyarakat yang masih sangat rendah

F. Saran

1. TPK PNPM Mandiri di Desa Ketangirejo harus lebih inovatif dalam menerapkan teknik-teknik sosialisasi pada masyarakat, misalnya melalui pendekatan kultur dari masyarakat di Desa Ketangirejo. Dalam sosialisasi tersebut harus lebih menonjolkan program-program PNPM Mandiri yang berifat matrealis mengingat sikap masyarakat Desa yang pada umumnya bersifat pragmatis.
2. Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan, maka dari hasil kajian penelitian tentang rendahnya partisipasi masyarakat pada program PNPM desa ketangirejo, perlu adanya dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi dari segenap elemen pemerintah (tokoh masyarakat) dan masyarakat bersama-sama mendukung proses program PNPM di desa Ketangirejo. Serta, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan perlu adanya program perbaikan ekonomi dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

G. Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, D. Riant. 2003 *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2000. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan Ke-1. Jakarta [ID]: Refika Aditama.

- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: edisi ke-2* jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tjandraningsih, 1996. *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Makalah Simposium, Bappenas, Jakarta
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.